

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sri Sularso (2003:29), “desain penelitian itu membahas masalah yang berkaitan dengan pemilihan rancangan utama untuk menjawab masalah atau menguji hipotesis”. Menurut Sugiyono (2006: 1), “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara *ilmiah* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Dalam Sugiyono (2006 : 11) dijelaskan juga bahwa “metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain”.

Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang, melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.

Dari uraian tersebut maka penulis menyimpulkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode deskriptif.

3.2 Operasional Variabel

Variabel-variabel yang diteliti tersebut dioperasionalkan sebagai berikut

Variabel	Indikator
Efektivitas Penerimaan Pajak Bioskop Kota Bandung	<p>Berdasarkan target yang ditetapkan oleh pemerintah dirumuskan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio efektivitas Pajak Bioskop berdasarkan Target $\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bioskop}}{\text{Target Penerimaan Pajak Bioskop}} \times 100\%$
Kontribusi Pajak Bioskop Kota Bandung terhadap PAD	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio kontribusi pajak bioskop terhadap PAD <p>Kontribusi Pajak Bioskop terhadap PAD</p> $= \frac{x}{z} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>x = Realisasi penerimaan pajak bioskop</p> <p>z = Realisasi penerimaan PAD</p>
Kemandirian Daerah Kota Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Kemandirian Daerah $= \frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$

3.3 Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:129), yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu laporan target dan realisasi Penerimaan pajak hiburan kota Bandung tahun 2001-2009 dan Laporan target dan realisasi APBD Kota Bandung dari tahun 2001-2009, secara spesifik data yang diperlukan yaitu jumlah target dan realisasi penerimaan pajak hiburan khususnya sektor bioskop kota Bandung dari tahun 2007-2009, jumlah target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung dari tahun 2001-2008 dan jumlah total penerimaan daerah kota Bandung yaitu PAD. Bagi hasil pajak dan bukan Pajak (BHPBP) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari tahun 2001-2009.

Data yang diambil untuk penelitian dimulai pada tahun 2001 yang merupakan tahun pertama dimulainya otonomi daerah sampai tahun dimana tersedianya laporan di Dispenda Kota Bandung yaitu tahun 2009, sedangkan untuk data penerimaan pajak bioskop diambil dari tahun 2007 sampai dengan 2009, karena sebelum tahun 2007 pada tidak ada laporan penerimaan pajak hiburan secara spesifik.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumentasi dan wawancara.

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:231) studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Data hasil studi dokumentasi dalam penelitian ini diantaranya data Pendapatan Asli Daerah, data penerimaan Pajak Daerah terutama yang berhubungan dengan Pajak Hiburan.

Dalam Jogiyanto (2005:93) disebutkan wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara intersep, dan wawancara telepon. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berwenang dan pihak yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti baik di Dinas Pendapatan Daerah maupun di tempat penelitian dilakukan guna melakukan konfirmasi data yang dibutuhkan dan melengkapi data yang tidak diperoleh melalui telaah dokumentasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.

Untuk mengetahui tentang analisis efektivitas Pajak Hiburan sektor bioskop dan juga kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah, penulis melakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun tabel analisis tingkat efektivitas Pajak Bioskop

- Menyusun tabel analisis tingkat efektivitas Pajak Bioskop berdasarkan Target

Tingkat efektivitas Pajak hiburan sektor bioskop dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak bioskop dengan target pajak bioskop yang ditetapkan. Untuk mengetahui efektivitas pajak hiburan berdasarkan target, maka digunakan perhitungan seperti berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak bioskop}}{\text{Target Penerimaan Pajak bioskop}} \times 100\%$$

(Abdul Halim, 2004:164)

Tabel 3.1
Tabel Kriteria Efektivitas Pajak Bioskop

Persentasi Efektivitas	Kriteria Efektivitas
Di atas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

- Menyusun tabel analisis tingkat efektivitas Pajak Bioskop berdasarkan Potensi

Tingkat efektivitas Pajak Bioskop dihitung dengan membandingkan antara penerimaan Pajak Bioskop dengan Potensi Pajak Bioskop yang diteliti.

Analisis potensi pajak Bioskop ini, dimaksudkan untuk menghitung besarnya potensi pajak Bioskop dengan menggunakan rumus :

$$\text{Potensi Pajak Bioskop} = (\text{Kategori hari} \times \text{Tingkat kunjungan} \times \text{Jumlah hari} \times \text{Jumlah tayang} \times \text{Jumlah Kursi} \times \text{Harga Tiket}) \times \text{Tarif Pajak}$$

Kategori Hari	Tingkat Kunjungan	Jumlah Hari	Jumlah Tayang	Jumlah Kursi	Harga Tiket	Omzet	Tarif Pajak	Potensi
Sepi	xx %	xxx hari	x	xxx	Rp. xxx	Rp. xxxxx	10%	Rp. xxxxx
Normal	xx %	xxx hari	x	xxx	Rp. xxx	Rp. xxxxx	10%	Rp. xxxxx
Ramai	xx %	xxx hari	x	xxx	Rp. xxx	Rp. xxxxx	10%	Rp. xxxxx
Jumlah Potensi Pajak Bioskop pertahun								Rp. xxxxx

(Mahmudi, 2009:68)

Dengan mengetahui potensi pajak bioskop, maka dapat diketahui efektivitasnya dengan cara berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Target Penerimaan Pajak Bioskop}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak Bioskop}} \times 100\%$$

(Abdul Halim, 2004:93)

Tabel 3.2
Tabel Kriteria Efektivitas Pajak Bioskop

Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
Di atas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

2. Menyusun tabel analisis kontribusi Pajak Bioskop terhadap PAD

Untuk menghitung sumbangan dan penerimaan pajak bioskop terhadap pajak daerah dan sumbangannya terhadap PAD maka digunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Bioskop terhadap PAD} = \frac{x}{z} \times 100\%$$

Abdul Halim (2004:163)

Keterangan :

x = Realisasi penerimaan pajak bioskop

z = Realisasi penerimaan PAD

3. Menghitung Tingkat Kemandirian Daerah

Menghitung tingkat kemandirian daerah kota Bandung berdasarkan perhitungan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah (TPD). Abdul Halim (2004:24) menjelaskan perhitungan dengan menggunakan rumus :

Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (PAD)

$$= \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

(Sumber : Abdul Halim, 2004:24)

Hasil dari perhitungan tersebut, kemudian dideskripsikan, dibantu dengan tabel pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber : (Abdul Halim, 2004:189)

Keterangan:

- Pola Hubungan instruktif berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi..
- Pola Hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- Pola hubungan delegatif berarti campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.